



RENCANA AKSI

**DIREKTORAT PENGADUAN, PENGAWASAN
DAN PENERAPAN SANKSI ADMINISTRASI
LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN TAHUN
2022**





KATA PENGANTAR

Rencana Aksi Direktorat Pengaduan, Pengawasan dan Penerapan Sanksi Administrasi Lingkungan Hidup dan Kehutanan (PPSA LHK) tahun 2022 ini disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan yang akan dilakukan oleh Direktorat Pengaduan, Pengawasan dan Sanksi Administrasi dalam kurun waktu 1 (satu) tahun kedepan.

Rencana Aksi ini memuat perencanaan dan prognosis per Triwulan di Tahun 2022 kedepan lingkup Kegiatan Penanganan Pengaduan, Pengawasan dan Sanksi Administrasi di dalam melaksanakan berbagai tugas yang di embankan dalam upaya mewujudkan pembangunan Rencana Kerja Direktorat Pengaduan, Pengawasan dan Penerapan Sanksi Administrasi Lingkungan Hidup dan Kehutanan berlandaskan Rencana Kerja Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan TA 2022 dan Rencana Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan TA 2022, dengan hasil sesuai rencana yang diharapkan dan secara keseluruhan dapat mencapai target dan sasaran yang telah ditetapkan dengan pemanfaatan anggaran dan sumber daya secara efektif dan efisien.

Dengan Rencana Aksi ini diharapkan adanya optimalisasi peran Direktorat Pengaduan, Pengawasan dan Sanksi Administrasi dalam peningkatan efisiensi, efektifitas dan produktifitas kinerja seluruh jajaran di lingkungan Direktorat Pengaduan, Pengawasan dan Penerapan Sanksi Administrasi Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada tahun tahun selanjutnya.

Plt. Direktur Pengaduan, Pengawasan
dan Penerapan Sanksi Administrasi Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Vinda Damayanti, S.Si, M.Sc



BAB I PENDAHULUAN

Rencana Aksi (Renaksi) Tahunan Direktorat Pengaduan, Pengawasan dan Penerapan Sanksi Administrasi Lingkungan Hidup dan Kehutanan (PPSA LHK) Tahun 2022 adalah dokumen rencana aksi tahunan ketujuh yang merupakan penjabaran dari Rencana Kerja Direktorat Pengaduan, Pengawasan dan Penerapan Sanksi Administrasi Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang diharapkan dapat memberikan gambaran singkat mengenai sasaran program dan sasaran kegiatan yang akan dicapai, serta kegiatan yang diprioritaskan oleh Direktorat Pengaduan, Pengawasan dan Penerapan Sanksi Administrasi Lingkungan Hidup dan Kehutanan terutama pencapaian sasaran kegiatan dalam mendukung capaian sasaran program di dalam Rencana Kerja Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

I.I MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dari Rencana Aksi Penetapan Kinerja TA 2022 adalah memberikan arah dan pedoman pada implementasi kegiatan yang dilakukan oleh Direktorat Pengaduan, Pengawasan dan Penerapan Sanksi Administrasi Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Tujuan dari Rencana Aksi ini adalah menyediakan peta jalan implementasi kegiatan lingkup Direktorat Pengaduan, Pengawasan dan Penerapan Sanksi Administrasi Lingkungan Hidup dan Kehutanan sehingga target yang telah ditetapkan dapat tercapai.

Rencana aksi ini menjadi acuan dalam penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Direktorat Pengaduan, Pengawasan dan Penerapan Sanksi Administrasi Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

I.II LANDASAN HUKUM

Pelaksanaan kegiatan Direktorat Pengaduan, Pengawasan dan Penerapan Sanksi Administrasi Lingkungan Hidup dan Kehutanan dilakukan dengan berpedoman pada regulasi yang ada, yaitu :

- Undang Undang nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;



- Peraturan Direktur Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan No P.8/PHLHK/SET.10/SET.1/11/2020 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2020-2024;
- Peraturan Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.6/PHLHK/SET.10/REN.2/9/2020 tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2020-2024.
- Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.905/MENLHK/SETJEN/SET.1/10/2021 tentang Rencana Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2022.
- Peraturan Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.6/PHLHK/SET.10/SET.1/11/2021 tentang Rencana Kerja Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2022.

BAB II RENCANA AKSI

Sesuai dengan perjanjian kerja Direktorat Pengaduan, Pengawasan dan Penerapan Sanksi Administrasi Lingkungan Hidup dan Kehutanan TA 2022, telah disampaikan bahwa kinerja Pengaduan, Pengawasan dan Penerapan Sanksi Administrasi Lingkungan Hidup dan Kehutanan adalah meningkatnya presentase pelaku usaha/kegiatan terhadap izin lingkungan hidup dan peraturan perundang-undangan terkait bidang lingkungan hidup dan kehutanan, yang pelaksanaannya dilakukan oleh unit kerja Direktorat Pengaduan, Pengawasan dan Penerapan Sanksi Administrasi Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Hal ini dapat dilihat dari sasaran kegiatan Penanganan Pengaduan, Pengawasan dan Sanksi Administrasi pada tabel berikut:

Rencana Aksi Program Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan TA 2022, sebagai berikut;

Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Sasaran Kegiatan	Target 2022	
Terselenggaranya dukungan manajemen yang Prima pada Ditjen Gakkum LHK	1) Indeks kepuasan layanan public 2) Nilai capaian reformasi birokrasi	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik	1 layanan	
Teramankannya hutan dari gangguan dan ancaman	Hutan yang diamankan dari gangguan dan ancaman	Terlaksananya operasi pengamanan hutan dan peredaran hasil hutan		
Meningkatnya ketaatan pelaku usaha/kegiatan terhadap izin lingkungan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah Kasus yang dilakukan penegakan hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Terselesaikannya sengketa lingkungan hidup melalui pengadilan dan di luar pengadilan	23 perkara	
		Terselesaikannya kasus pidana lingkungan hidup dan kehutanan sampai dengan P21	130 perkara	
	Presentase pemegang izin yang taat terhadap peraturan terkait bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Terawasinya usaha dan/atau kegiatan terhadap ketaatan izin lingkungan dan peraturan perundang-undangan bidang LHK		750 Badan Usaha
				50 Badan Usaha 150 PPLH

Rencana Aksi Kegiatan Penanganan Pengaduan, Pengawasan dan Sanksi Administrasi TA 2022, sebagai berikut:

Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Sasaran Kegiatan	Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target TA 2022	Satuan	
Meningkatnya Ketaatan Pelaku Usaha/Kegiatan terhadap Izin Lingkungan dan Peraturan Perundang-Undangan					65	Persen	
	Presentase pemegang izin yang taat terhadap peraturan terkait bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan						
		Terawasinya usaha dan/atau kegiatan terhadap ketaatan izin lingkungan dan peraturan perundang-undangan bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Penanganan Pengaduan, Pengawasan dan Sanksi Administrasi	Jumlah usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap Peraturan Bidang LHK	750	Badan Usaha	
					50	Badan Usaha	
					PPLH yang ditingkatkan kapasitasnya	150	Orang

Adapun kegiatan lingkup Direktorat Pengaduan, Pengawasan dan Sanksi Administrasi pada tahun 2022 adalah sebagai berikut:

KEGIATAN	PUSAT	SUM	JBN	KAL	SUL	MAP	TOTAL	SATUAN
Usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap Peraturan Bidang LHK	278	143	127	139	80	33	750	Badan Usaha
Pengaduan, Pengawasan dan Sanksi Administrasi yang ditangani							750	Badan Usaha
Penanganan Pengaduan Perusahaan	108	60	52	60	30	15	325	Badan Usaha
Penanganan Pengaduan Non Perusahaan	200	105	100	85	85	25	600	Pengaduan
Pengawasan Bidang LHK	120	83	75	79	50	18	425	Badan Usaha
Sanksi Administrasi	130						130	Sanksi
Penerapan Sanksi Administratif pada permasalahan penggunaan Kawasan hutan							50	Badan Usaha
Penerapan sanksi administratif pada permasalahan penggunaan Kawasan hutan	50						50	Badan Usaha
PPLH yang ditingkatkan kapasitasnya							150	Orang
Peningkatan kapasitas PPLH bidang LHK	125	5	5	5	5	5	150	Orang



BAB III PENUTUP

Tercapainya sasaran kegiatan Penanganan Pengaduan, Pengawasan dan Sanksi Administrasi dari unit kerja di lingkup Direktorat Pengaduan, Pengawasan dan Penerapan Sanksi Administrasi Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Oleh karena itu, rencana aksi ini disusun sebagai acuan bagi pelaksana di lingkungan Direktorat Pengaduan, Pengawasan dan Penerapan Sanksi Administrasi Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta semua pemangku kepentingan dalam upaya penurunan gangguan, ancaman dan pelanggaran hukum lingkungan hidup dan kehutanan akibat Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Rencana aksi ini digunakan sebagai acuan dalam perencanaan, pelaksanaan dan penilaian upaya pengembangan sesuai dengan kepentingan dan kebijakan penyelenggaraan kegiatan, dengan memperhatikan penilaian yang dilakukan melalui pemantauan dan evaluasi. Dengan disusunnya rencana aksi ini dapat mendorong penyelenggaraan kegiatan penanganan pengaduan, pengawasan dan sanksi administrasi secara efektif dan efisien dalam rangka mencapai sasaran program yang sebaik-baiknya. Upaya yang dilakukan dengan dedikasi, kerja keras dan bersungguh-sungguh serta dukungan dari semua pemangku kepentingan untuk pelaksanaan kegiatan penanganan pengaduan, pengawasan dan sanksi administrasi agar dapat mendukung pencapaian tujuan program maupun kementerian secara menyeluruh.



BAB V LAMPIRAN-LAMPIRAN

TABEL 1 – MATRIKS INDIKATOR KINERJA UTAMA DIREKTORAT JENDERAL GAKKUM KLHK - PPSA

Sasaran Strategis KLHK	Indikator Kinerja Utama	Program (Redesign)	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Sasaran Kegiatan	Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	RO	KRO	Tahun 2022	Satuan	Ket	
Terselenggaranya Tata Kelola dan Inovasi Pembangunan Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang baik serta kompetensi Sumber Daya Manusia Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang berdaya saing (SS 4)	Jumlah Kasus Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang ditangani melalui Penegakan Hukum (IKU 14)	Pengelolaan Hutan Berkelanjutan											
		Pengelolaan Lingkungan Hidup	Meningkatnya Ketaatan Pelaku Usaha/Kegiatan terhadap izin lingkungan dan peraturan perundang-undangan	Persentase Pelaku Usaha/Kegiatan terhadap izin lingkungan hidup dan Peraturan Perundang-undangan terkait Bidang LHK Meningkat							65	Persen	RPJMN
											65	Persen	RKP
		Terawasinya Usaha dan/atau kegiatan terhadap ketaatan izin lingkungan dan peraturan perundang undangan terkait bidang LHK	Penanganan Pengaduan, Pengawasan dan Sanksi Administrasi	Jumlah Usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap Peraturan Bidang LHK	PENGAWASAN KETAATAN LHK TERHADAP BADAN USAHA	(QIH) Pengawasan dan Pengendalian Badan Usaha					1700	Badan Usaha	RPJMN
											750	Badan Usaha	RKP
											n/a	Badan Usaha	RPJMN
											50	Badan Usaha	
							PPLH yang ditingkatkan kapasitasnya	PENINGKATAN KAPASITAS PPLH	(DCE) Pelatihan Bidang LHK		700	Orang	RPJMN
				150	Orang	RKP							



			Terselesainya kasus penegakan hukum bidang lingkungan hidup dan kehutanan	Jumlah Kasus yang dilakukan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan												
	Nilai Kinerja Reformasi Birokrasi (IKU 18)	Dukungan Manajemen														

TABEL 2 – RENCANA AKSI KEGIATAN PENGADUAN, PENGAWASAN DAN SANKSI ADMINISTRASI TAHUN 2022

Program (Redesign)	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Sasaran Kegiatan	Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Rincian Output (RO)	Klasifikasi Rincian Output (KRO)	Sub Output	TW I	TW II	TW III	TW IV	Tahun 2022	Satuan	Ket							
Pengelolaan Lingkungan Hidup	Meningkatnya Ketaatan Pelaku Usaha/Kegiatan terhadap izin lingkungan dan peraturan perundang-undangan	Persentase Pelaku Usaha/Kegiatan terhadap izin Lingkungan hidup dan Peraturan Perundang-undangan terkait Bidang LHK Meningkat	Terawasinya Usaha dan/atau kegiatan terhadap ketaatan izin lingkungan dan peraturan perundang undangan terkait bidang LHK	Penanganan Pengaduan, Pengawasan dan Sanksi Administrasi	Jumlah Usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap Peraturan Bidang LHK	PENGAWASAN KETAATAN LHK TERHADAP BADAN USAHA	(QIH.001) Pengawasan dan Pengendalian Badan Usaha							65	Persen	RPJMN						
																			65	Persen	RKP	
																				1700	Badan Usaha	RPJMN
																				750	Badan Usaha	RKP
															Pengaduan Perusahaan	60	90	90	85	325	Badan Usaha	
															Pengaduan Non Perusahaan	125	150	175	150	600	Pengaduan	
															Pengawasan	70	120	125	110	425	Badan Usaha	
															Sanksi Administrasi	25	35	40	30	130	Badan Usaha	
							(QIH.002) Penerapan Sanksi Administratif pada permasalahan penggunaan kawasan hutan						50	Badan Usaha								
							Penerapan sanksi administratif	5	15	20	10	50	Badan Usaha									



								pada permasalahan penggunaan kawasan hutan								
					PPLH yang ditingkatkan kapasitasnya	PENINGKATAN KAPASITAS PPLH	(DCE) Pelatihan Bidang LHK						700	Orang	RPJMN	
													150	Orang	RKP	
								Peningkatan Kapasitas PPLH	-	50	50	50	150	Orang		



TABEL 3 – RENCANA AKSI DIREKTORAT PENGADUAN, PENGAWASAN DAN SANKSI ADMINISTRASI TAHUN ANGGARAN 2022

Direktorat	Indikator Kinerja Kegiatan	Rincian Output (RO)	Klasifikasi Rincian Output (KRO)	Unit Kegiatan (Subdirektorat)	Indikator Kinerja Unit Kegiatan	TW I	TW II	TW III	TW IV	Tahun 2022	Satuan	Ket		
Penanganan Pengaduan, Pengawasan dan Sanksi Administrasi	Jumlah Usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap Peraturan Bidang LHK	PENGAWASAN KETAATAN LHK TERHADAP BADAN USAHA	(QIH.001) Pengawasan dan Pengendalian Lembaga							1700	Badan Usaha	RPJMN		
										228	Badan Usaha	RKP		
				Subdit Penanganan Pengaduan	Pengaduan Perusahaan	20	30	35	23	108	Badan Usaha			
					Pengaduan Non Perusahaan	40	55	65	40	200	Pengaduan			
				Subdit Pengawasan Izin	Pengawasan Izin	20	40	40	20	120	Badan Usaha			
			Subdit Penerapan Sanksi Administrasi	Sanksi Administrasi	25	35	40	30	130	Badan Usaha				
			(QIH.002) Penerapan Sanksi Administratif pada permasalahan penggunaan Kawasan hutan						50	Badan Usaha				
				Subdit Penerapan Sanksi Administrasi	Penerapan Sanksi Administratif pada permasalahan penggunaan Kawasan hutan	5	15	20	10	50	Badan Usaha			
			PPLH yang ditingkatkan kapasitasnya	PENINGKATAN KAPASITAS PPLH	(DCE) Pelatihan Bidang LHK							700	Orang	RPJMN
												150	Orang	RKP / ARG
PPLH yang ditingkatkan kapasitasnya	Peningkatan Kapasitas PPLH	-				50	50	50	150	Orang				
	Dukungan Sarana Prasarana	1				-	-	-	1	Kegiatan				



TABEL 4 – PROGNOSIS CAPAIAN KEGIATAN PER BULAN DIREKTORAT PPSA TA 2022

No	Indikator Kinerja Kegiatan	Bulan												Target TA 2022	Satuan
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1	Usaha dan/atau Kegiatan yang Diawasi Ketaatannya terhadap Peraturan Bidang LHK													800	Badan Usaha
	Pengaduan, Pengawasan dan Sanksi Administrasi	80	95	100	110	110	120	130	130	130	130	125	90	750	Badan Usaha
	Penerapan Sanksi Administratif pada permasalahan penggunaan Kawasan hutan	-	2	3	5	5	5	5	8	7	4	3	3	50	Badan Usaha
2	PPLH yang Ditingkatkan Kapasitasnya	-	-	-	-	-	50	-	-	50	-	50	-	150	Orang

TABEL 5 – RENCANA AKSI PENANDAAN ANGGARAN RESPONSIF GENDER (ARG) DIREKTORAT PENGADUAN, PENGAWASAN DAN SANKSI ADMINISTRASI TAHUN ANGGARAN 2022

KODE	URAIAN	Perencanaan					Satuan	Penganggaran	
		TW I	TW II	TW III	TW IV	TARGET 2021		Kegiatan PPSA (Ribu)	Direktorat PPSA (Ribu)
5430.DCE	PPLH yang ditingkatkan kapasitasnya [Base Line]						Orang	2.720.800	2.220.800
054	Peningkatan kapasitas PPLH bidang LHK					150	Orang	1.520.800	1.020.800
A	Diklat pembentukan PPLH kerjasama dengan BP2SDM	-	-	30	-				350.000
B	Refreshment PPLH / Supervisi PPLH	-	50	-	30				370.800
C	Diklat Teknis Pendukung Kompetensi PPLH	-	-	-	20				300.000
052	Dukungan Teknis Pengaduan, Pengawasan, dan Sanksi Administrasi					1	Kegiatan	1.200.000	1.200.000
A	Alat Perlindungan Diri PPLH	1	-	-	-				180.000
B	Sarana dan Prasarana Direktorat PPSA & Balai	1	-	-	-				885.000
D	Pencegahan dan Penanggulangan Pandemi Covid-19	1	-	-	-				135.000